

Tak Miliki IMB

# Bupati Badung Putuskan Segel Hotel Crystal

Mangupura (Bali Post) -

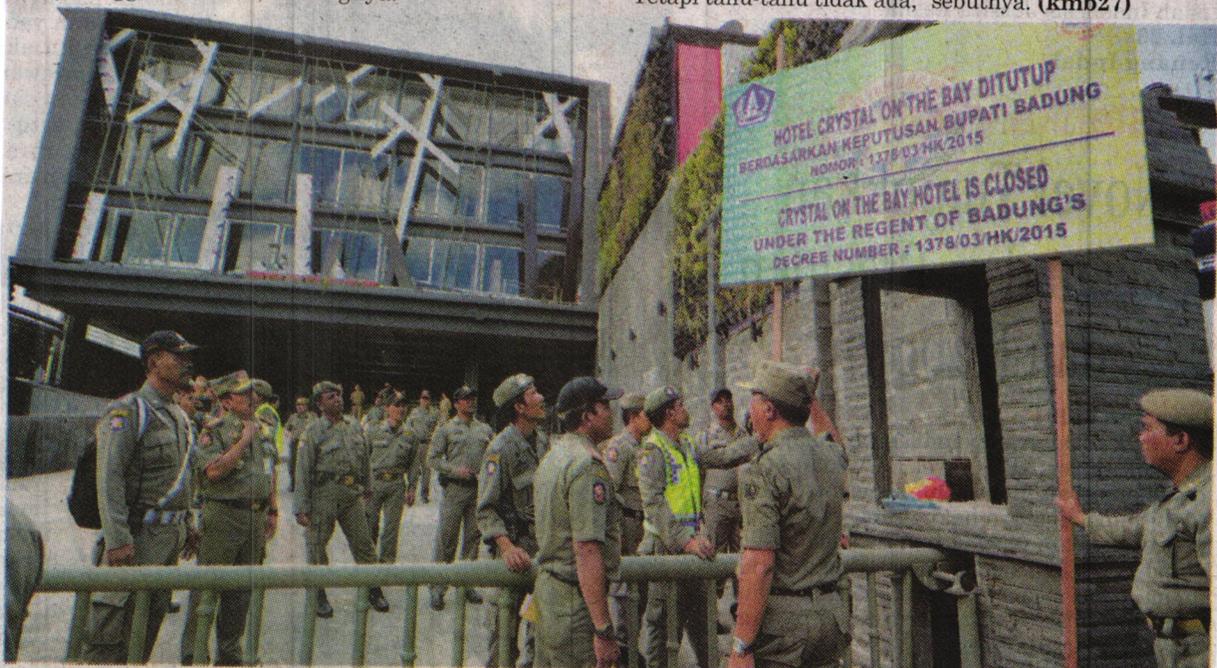
Setelah lama berlarut-larut, Bupati Badung A.A. Gde Agung akhirnya memutuskan untuk menyegel Hotel The Crystal On The Bay, Rabu (3/6) kemarin. Tim Yustisi yang melibatkan Satpol PP memasang sebuah pelang dan stiker di area hotel sebagai tanda telah dilakukan penyegelan. Upaya ini untuk menghentikan seluruh aktivitas tukang yang ada. Sikap ini ditempuh lantaran yang bersangkutan tidak mengindahkan surat teguran yang dilayangkan pemerintah setempat.

Hal itu dibenarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Badung Ketut Martha yang sekaligus sebagai Ketua Tim Yustisi Kabupaten Badung. Penyegelan ini didasari Keputusan Bupati Badung Nomor 1378/03/HK/2015 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Perintah Nomor 233 Tahun 2015 tertanggal 1 Juni 2015. "Intinya (surat keputusan - red) memerintahkan kami untuk segera melaksanakan penyegelan Hotel The Crystal On The Bay lantaran telah melakukan kegiatan pembangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai ketentuan Pasal 5, 22, dan 33 Perda Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan IMB," terangnya.

Dia menugaskan anggotanya di Kuta Selatan untuk siaga melakukan pengawasan selama beberapa hari untuk memastikan pelaksanaan keputusan itu. "Minimal harus ada dua anggota yang ngepos dan memastikan tidak ada kegiatan pembangunan apapun di Hotel Crystal On The Bay sebelum mengantongi IMB," ucapnya.

Kendati demikian, dia mengaku Tim Yustisi yang datang tidak berhasil menemui orang-orang berkompeten dari pihak hotel, termasuk pimpinan proyek. Padahal pukul 09.00 wita pimpro yang disebut-sebut bernama Lim terlihat lalu-lalang di depan hotel, namun menghilang ketika Tim Yustisi tiba di lokasi.

Martha mengaku benar-benar meragukan keseriusan pihak hotel untuk menaati prosedur hukum yang berlaku di Kabupaten Badung. Terlebih, selama ini dari tiga kali surat panggilan dan sekali surat undangan yang dilayangkan, tidak ada sama sekali yang dipenuhi. "Sesungguhnya kami berharap mereka hadir di tempat ini. Tadi saya sudah janji kepada Pak Lim agar dikumpulkan semua tukang di sini untuk diberikan pengarahan, supaya mereka semua tahu tentang keberadaan petugas di sini biar tidak kaget. Tetapi tahu-tahu tidak ada," sebutnya. (kmb27)



Bali Post/eka

SEGEL - Petugas Satpol PP Badung memasang papan penyegelan Hotel Crystal On The Bay di Jalan By-pass Ngurah Rai, Mumbul, Nusa Dua, Rabu (3/6) kemarin. Hotel tersebut disegel karena melanggar IMB.

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 2



## Dua Tahun Berbenah, Tabanan Raih WTP

**KERJA** keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan dalam membenahi sektor pengelolaan anggaran daerah tidak sia-sia. Setelah sempat diganjar *disclaimer* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengelolaan anggaran tahun 2012, perbaikan menyeluruh mulai diterapkan.

Hasil yang diperoleh dari upaya itu, pengelolaan anggaran tahun 2013 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dan kini, setelah dua tahun melakukan upaya yang sama secara konsisten, opini tersebut terdorong menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga hal ini menjadi sejarah tersendiri bagi Pemkab Tabanan.

Kepastian mengenai opini tersebut terungkap Rabu (3/6) kemarin dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2014 di Kantor BPK RI Perwakilan Bali. LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dari Ketua BPK Perwakilan Bali Arman Syifa.  
Hal. 23  
Lakukan Evaluasi



**PENGHARGAAN** - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima penghargaan atas WTP Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2014 di kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 1



## Lakukan Evaluasi

### Dari Hal. 1

Turut mendampingi Bupati Eka saat itu Wakil Ketua DPRD Tabanan I Wayan Gindera.

Menariknya, ada tradisi baru yang diterapkan BPK dalam penyerahan LHP kali ini. Penyerahan LHP dengan opini WTP yang diterima Tabanan ini dikukuhkan dalam bentuk penyerahan piagam.

Dalam sambutannya, Arman Syifa mengatakan telah mempertimbangkan apa yang telah dilaksanakan Pemkab Tabanan selama dua tahun terakhir. Dari hasil evaluasi tersebut, tidak sedikit perkembangan yang telah dicapai dari sisi pengelolaan anggaran. Dan, hal ini ditunjang respons cepat Pemkab Tabanan dalam menindaklanjuti setiap temuan dari hasil pemeriksaan selama dua tahun terakhir.

"Kami telah melakukan evaluasi dan melihat banyak perkembangan yang signifikan. Ini menjadi dasar penilaian kami. Sehingga kami memberikan opini yang lebih yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Arman.

Selain memberikan selamat, Arman Syifa juga meminta agar Pemkab Tabanan mempertahankan predikat ini. Untuk mempertahankan predikat tersebut, Pemkab Tabanan diharapkan memberi perhatian lebih terhadap beberapa hal penting yang menyangkut

pengelolaan anggaran.

Dalam uraian singkatnya, beberapa hal penting itu terdiri dari 15 item pada sistem pengendalian internal (SPI) di antaranya menyangkut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Tabanan, lampu penerangan yang masih ganda, dana sekolah yang memerlukan mekanisme, atau belanja insentif pungutan daerah. Selanjutnya, sebelas item yang berkenaan dengan asas kepatuhan meliputi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum tertib atau penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih bermasalah.

Sementara itu, Bupati Eka mengungkapkan rasa syukurnya atas opini yang diberikan BPK di tahun ini. Baginya, ini merupakan kado istimewa bagi kepemimpinan Eka Jaya yang sebentar lagi akan berakhir pada Agustus 2015.

"Tentu secara pribadi saya bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa untuk opini ini. Ini merupakan hadiah bagi kepemimpinan Eka Jaya di akhir masa tugasnya. Dan, tentunya ini merupakan kerja keras semua pihak yang tetap menjaga semangat dan konsistensinya untuk memperbaiki pengelolaan anggaran daerah," ungkapnya usai penyerahan LHP.

Dia melanjutkan, dengan diraihnya opini WTP, semangat dan konsistensi yang sudah terbangun di seluruh jajaran

Pemkab Tabanan harus tetap terjaga. Sebab, WTP merupakan kesempatan untuk tetap melakukan perbaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga anggaran daerah setiap tahunnya dikelola secara wajar dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Meski sekarang dapat WTP, kita jangan berpuas diri dulu. Jangan terlalu senang, apalagi sampai 'tidur'. Karena masih ada beberapa PR (pekerjaan rumah) yang harus dituntaskan. Apalagi PR itu bersifat teknis. Apalagi ke depannya kita diwajibkan membuat laporan berbasis *accrual* yang sudah diamanatkan undang-undang," imbuh Bupati Eka.

Jadi, sambungnya, semua satuan kerja di lingkungan Pemkab Tabanan mesti tetap menjaga komitmennya menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan negara dengan tertib dan disiplin. "Itu pun harus dengan hati yang tulus. Dan, jangan pernah malas bertanya dan belajar. Karena tugas kita melayani publik," tegasnya. Selain menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajarannya, Bupati Eka juga memberikan apresiasi yang sama kepada DPRD Tabanan selaku lembaga legislatif yang memiliki wewenang di bidang *budgeting*. Kerja sama yang telah terbangun di bidang tersebut diharapkan tetap terjaga dengan baik. (ad198)

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 23



# Mandek, Kasus Penanganan Aset Pemprov

Denpasar (Bali Post) -

Pengelolaan aset Pemprov Bali khususnya yang berupa tanah masih banyak menuai masalah. Kendati Pansus Aset DPRD Bali periode 2014-2019 telah dibentuk kembali, masalah atau kasus aset masih banyak yang belum tuntas. Misalnya, penyelesaian kasus yang banyak menyita perhatian publik seperti berpindahtangannya 2,5 hektar aset Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur hingga saat ini mandek dan belum ada kemajuan. Masalah aset pemprov di Desa Sumber Kelampok, Gerogak, Buleleng yang dimohonkan hak pelepasan oleh warga yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya.

"Kami harapkan Pemprov Bali jangan setengah hati menangani kasus-kasus aset yang ada. Jangan kasus aset ini dibiarkan mengendap," kata mantan anggota DPRD Bali (periode 2009-2014), Ida Bagus Putu Parta, Rabu (3/6) kemarin.

Politisi Demokrat asal Geria Denkayu Mengwi ini berharap ada komitmen serius dan langkah nyata dari Pemprov Bali bersama DPRD Bali menangani kasus aset pemprov baik yang bermasalah dengan masyarakat maupun para pengusaha. Khusus terkait masalah aset di Bali Hyatt,

ia meminta agar kasus berpindahtangannya aset pemprov ini diusut tuntas, jangan sampai ada oknum pejabat di eksekutif dan legislatif yang "memancing di air keruh".

Pria yang akrab disapa Gus Parta itu juga menyayangkan transparansi pengelolaan aset masih lemah. Pemprov belum pernah membuka ke publik di mana saja aset pemprov yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau disewakan, siapa penyewanya dan berapa nilainya. "Mestinya pengelolaan aset daerah jelas, transparan dan akuntabel serta informasinya dapat diakses publik secara

luas. Jangan sampai aset terkesan diobral untuk oknum di birokrat dan dikuasai kalangan tertentu," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai mengatakan, saat ini ada banyak aset daerah yang ditutupi keberadaannya. Politisi PDI-P asal Buleleng itu menyebut salah satu contoh adalah aset Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur. Menurut dia, ada kesan yang sangat kuat bahwa aset berupa lahan (DN71 dan DN72) itu justru terkesan ditutup-tutupi keberadaannya. "Ada indikasi, pejabat yang bermain. Sebab, rata-rata aset yang

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 9



keberadaannya ditutup-tutupi justru berada di daerah yang penghasilannya tinggi, seperti Hotel Bali Hyatt," katanya.

Menurut Dewa Rai, jika aset tersebut dirupiahkan dengan perkiraan harga lahan sebesar Rp 2 miliar per are, maka aset Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt adalah senilai Rp 54 miliar. Belum termasuk bagi hasil dari hotel, yang komposisinya 60 persen untuk hotel dan 40 persen untuk daerah. Aset lainnya yang dicurigai disembunyikan keberadaannya adalah aset Pemprov Bali di BTDC Nusa Dua. Dari Pansus Aset dewan periode sebelumnya, juga diketahui bahwa di kawasan wisata elite tersebut ada aset milik Pemprov Bali di dalamnya. "Tetapi karena diduga ada pejabat yang bermain, maka penerimaan daerah dari BTDC justru hanya Rp 7 miliar per tahun. Ini tidak masuk akal. Kalau saja tidak ada permainan di sana, semestinya daerah bisa

menerima hingga Rp 50 miliar dari BTDC," tegas Dewa Rai.

Secara terpisah praktisi dan pengamat ekonomi Mangku Wayan Gede Suyatartha mengatakan, mestinya ada aturan yang jelas terkait pengelolaan aset daerah termasuk bagaimana SOP-nya (Standar Operasional Prosedur). Dalam setiap kerja sama aset dengan pihak ketiga, imbuhnya, selain mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam pengelolaan aset daerah, mestinya ada semacam tim independen berupa tim *appraisal* yang menilai berapa harga sewa aset berupa tanah di satu titik tertentu. Jangan sampai aset tersebut disewakan jauh lebih murah daripada harga pasar. Sementara itu, kerja sama aset yang letaknya di tempat-tempat strategis mestinya dirancang dalam bentuk lelang. Siapa penawar tertinggi, maka pihak itulah yang berhak menyewa aset tersebut. (kmb29)

Edisi : Kamis 4 Juni 2015

Hal : 9



## Pembuktian Terbalik Kasus TPPU

# Mantan Bupati Candra Ngaku Miliki Pinjaman Rp 75 Miliar

Denpasar (Bali Post) -

Wayan Candra, mantan Bupati Klungkung dua periode, ini kembali dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Mantan penguasa di bumi serobotan itu didakwa atas dugaan korupsi, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sidang yang dipimpin majelis hakim Hasoloan Sianturi dengan hakim anggota Sumali dan Hartono memberikan kesempatan pada terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Suryatin Lijaya, Nyoman Putra dan Warsa T. Bhuana, untuk melakukan pembuktian terbalik, khususnya dalam perkara TPPU.

Selain menghadirkan empat saksi meringankan, terdakwa juga membeber sejumlah tumpukan dokumen pinjaman dan penghasilannya selama menjabat sebagai bupati. Bahkan terungkap, selama menjabat bupati dua periode, Candra tercatat memiliki 118 pinjaman dengan total mencapai Rp 75 miliar. Sedangkan

penghasilannya mencapai Rp 16 miliar. Selain gaji, asal-muasal kekayaan itu sebagaimana disampaikan di persidangan, juga dari hasil usaha lainnya selain pengacara. Bahkan, usaha lainnya diakui bisa mencapai Rp 11 miliar. Candra mengaku sudah menyusun dokumen dan bukti pendukung pernyataannya tersebut.

Sementara saksi yang diperiksa adalah Nyoman Trinadi, Nengah Yadnya, Nyoman Armini. Mereka menjelaskan soal pendapatan terdakwa Candra dari sejumlah perusahaan yang didirikannya. Salah satunya adalah direktur di PT Gopalji yang bergerak di bidang air minum kemasan. Saksi di depan persidangan mengatakan, Candra memiliki saham 60 persen dan saksi dapat 40 persen. Perusahaan ini tidak memiliki rekening.

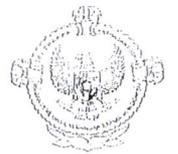
Jaksa penuntut umum (JPU) Made Pasek dkk. mencoba mengorek soal pendapatan, pembayaran, hingga pajak. Walau disebut perusahaan ini berkembang sangat pesat di era 2003 hingga 2008, namun terungkap adanya pengelolaan yang amburadul. Saksi tidak mengetahui soal

pajak, saksi hanya mengaku menerima pendapatan dari Candra. Bahkan, saksi menyebut pembelian air itu ada yang langsung dibayarkan ke Candra saat terdakwa menjabat bupati. Hingga akhirnya, kondisi perusahaan kolap karena antara saksi dan Candra sulit dan jarang berkomunikasi.

Dalam sidang terungkap, sebelumnya penjualan air kemasan ini per tahun mencapai Rp 1,9 miliar dengan laba bersih mencapai Rp 650 juta hingga Rp 750 juta. "Dari pendapatan ini, Pak Candra bisa dapat deviden Rp 300 juta hingga Rp 350 juta per tahun," jelas saksi.

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 3



Sambungan - - -



Bali Post/eka

**PERSIDANGAN - Terdakwa Wayan Candra tengah bersiap mengikuti proses persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (3/6) kemarin. Mantan Bupati Klungkung dua periode tersebut disidangkan terkait dugaan korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa, Klungkung, gratifikasi dan TPPU.**

Saksi lainnya menjelaskan soal pinjaman Candra, seperti dari Putu Suwirya Rp 20 miliar. Peminjaman itu ketika Candra mengalami masalah di salah satu bank. Atas kesaksian itu, majelis hakim meminta Candra untuk merinci hasil pinjaman dan penghasilannya dan diserahkan dalam pledoi mendatang.

Dalam sidang terpisah, Candra kemarin juga menjadi saksi atas terdakwa Ketut Janapria, I Made Ngurah dan A.A. Sagung Mastini. Ada penjelasan yang dinilai aneh saat kesaksian Candra,

yakni soal Anggara Juni Sari. Candra mengaku kenal Anggara setelah menjadi PNS. Sidang yang dipimpin majelis hakim Beslim Sihombing ini, sempat berlangsung sengit. Pasalnya, saksi-saksi yang dihadirkan diduga ada yang tidak jujur bahkan terkesan "mencari selamat". Itu terjadi ketika Candra ditanya terkait keterangan Plt. Kadishub Klungkung I Wayan Tika dan mantan Camat Dawan Wayan Sujana.

Beslin menanyakan kebenaran keterangan Tika dan Sujana terkait uang ganti

rugi milik Anggara Juni Sari Rp 1,1 miliar atas tanah di Desa Gunaksa yang diberikan kepada Candra saat menjabat Bupati Klungkung. Keterangan itu dibantah Candra, yang menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Mendengar jawaban Candra, majelis hakim langsung memerintahkan JPU menindaklanjuti keterangan Tika dan Sujana yang sudah sempat diperiksa dalam sidang sebelumnya. "Kalau perlu, tahan mereka," ujar Beslin menyikapi adanya perbedaan keterangan tersebut. (kmb37)

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 3



# Pilkada Tabanan Sedot Rp 24,1 Miliar

Tabanan (Bali Post) -

Pilkada Tabanan menyedot APBD Rp 24,1 miliar. Rinciannya, KPUD Tabanan memerlukan dana Rp 16,4 miliar, Panwas Rp 4,7 miliar dan dana pengamanan Rp 3 miliar. Dana tersebut digunakan selama proses pilkada seperti pencetakan dokumen dan surat suara serta formulir lainnya. Namun, sebagian besar digunakan untuk honor penyelenggara Pilkada mulai di PPK, PPS sampai KPPS di tingkat TPS. Beruntung dalam Pilkada ini tidak ada putaran kedua tapi hanya satu putaran sehingga anggaran masih bisa diirit dari sebelumnya dirancang sekitar Rp 23 miliar lebih.

Ketua KPUD Tabanan Luh Darayoni mengatakan anggaran tersebut sudah masuk rekening KPUD Tabanan. "Anggarannya sudah di rekening KPUD Tabanan. Kebutuhan untuk Pilkada di KPUD saja sebesar Rp 16,4 miliar," katanya, Rabu (3/6) kemarin.

Pelaksanaan Pilkada juga menyedot dana untuk panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Panwaslu Tabanan seperti diungkapkan ketuaanya, I Made Rumada, membutuhkan dana cukup besar. Pemkab Tabanan telah menganggarkan dana sebesar Rp 4,7 miliar. Diakui dana sebesar itu sebagian besar digunakan untuk honor petugas. "Kini di tiap TPS ada satu petugas pengawas, sehingga dana yang dibutuhkan sangat besar untuk pengawasan," katanya.

Selain dana untuk KPUD dan Panwaslu, Pilkada juga butuh pengamanan yang sangat ketat. Pengamanan ini melibatkan kepolisian tetapi juga TNI, Linmas dan pealang. Tidak salah kemudian pihak keamanan mengajukan anggaran sebesar Rp 3 miliar.

Kapolres Tabanan AKBP I Komang Suartana menyebutkan telah mengajukan perencanaan anggaran tersebut ke Pemkab Tabanan. Di tengah minimnya APBD Kabupaten Tabanan, tentu saja pihak eksekutif harus membuat strategi agar kebutuhan anggaran tersebut bisa terpenuhi.

Ketua DPRD maupun Bapeda Tabanan belum bisa dikonfirmasi secara rinci terkait sejumlah proyek yang kemungkinan dikoreksi untuk memenuhi anggaran Pilkada

tersebut. Ketua Dewan Ketut 'Boping' Suryadi mengakui jika dirinya tidak paham akan hal tersebut.

Di sisi lain, Kepala Bapeda Tabanan IB Wiratmaja saat dihubungi membenarkan dengan kebutuhan anggaran yang menyedot APBD sangat tinggi tersebut sejumlah kegiatan memang sementara ditunda. "Anggaran hanya Rp 384 miliar. Dana ini banyak tersedot untuk kegiatan rutin maka kegiatan-kegiatan nonrutin saja yang bisa ditunda termasuk di dalamnya infrastruktur," jelasnya. Ditanya tentang detail proyek apa saja, dirinya belum bisa memberikan data pasti karena tengah berada di luar daerah. "Maaf untuk data pastinya saya tidak ingat, karena sekarang lagi tugas kedinasan di luar daerah," pungkasnya. (kmb28)

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 12